



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONNY BONAR H. SIBURIAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 505531

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.095.800.000

1. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
2. Tanah Seluas 447 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
3. Tanah Seluas 1.080 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 114.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
5. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
6. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
7. Tanah Seluas 574 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , WARISAN Rp. 635.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/377 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , WARISAN Rp. 3.250.000.000
9. Tanah Seluas 30.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/128 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
11. Tanah Seluas 257 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL



SENDIRI Rp. 102.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 40.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.

40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 113.656.885

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 5.249.456.885

III. HUTANG

Rp. 1.025.082.920

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.224.373.965

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.